

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Angkasa et al. *Viktimologi: Dasar-dasar dan Isu Kontemporer Perlindungan Hukum Korban (Hak Korban, Restitusi–Kompensasi, Restorative Justice, dan Victim Impact Statement)*. Jakarta: Prenada Media, 2026.

Huda, H. U. N. et al. *Data Pribadi, Hak Warga, dan Negara Hukum: Menjaga Privasi di Tengah Ancaman Digital*. Bandung: Penerbit Widina, 2024.

Lamintang, P. A. F., dan F. T. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Margono, Rudi. *Korban yang Bicara: Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Profesor Rudi Margono, 2026.

Rizkiyanto, E., F. A. Sudewo, dan K. Rizkianto. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Cyberbullying melalui Media Elektronik*. Penerbit NEM, 2024.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Cetakan ke-5. Bandung: PT Alumni, 2007.

Sunarso, H. S. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Susanti, V. *Perempuan Membunuh?: Istri sebagai Korban dan Pelaku KDRT*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.

Waluyo, Bambang. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

B. Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Amelia, D. P., H. Nurhasanah, D. D. A. A. Islami, dan S. Tetrya. "Digital Photography in Public Spaces as an Emerging Challenge to Indonesia's Privacy Protection and Information Ethics." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2025): 261–270.

Amelia, S. "Ruang Cyber vs Kebebasan Berpendapat: Menyeimbangkan Regulasi dan Ekspresi di Era Digital." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 4, no. 2 (2024): 217–234.

Ar, S. A. S. "Perumusan Sanksi Pidana dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 17, no. 1 (2012): 20–30.

Aulia, K. A., dan A. Suherman. "Urgensi Pengakuan Hak Korban sebagai Hak Asasi Manusia dalam Proses Sistem Hukum Pidana yang Berkeadilan." *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan* 5, no. 4 (2024).

Debra, A., N. Yohannes, dan R. Banke. "Rehabilitasi Trauma Korban Tindak Pana." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 6 (2023): 586–591.

Dewi, A. R. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pemerasan Seksual (Seksstorsi).” 2025.

Dinata, B. “Tubuh, Gender, dan Agensi: Kajian Antropologi Visual tentang Representasi Perempuan di Media Sosial.” *Nizamiyah: Jurnal Sains, Sosial dan Multidisiplin* 1, no. 1 (2025): 71.

Febriyana, E. “Keabsahan Circumstantial Evidence (Bukti Tidak Langsung) dalam Memperkuat Keyakinan Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Kesusilaan (Ditinjau dari Viktimologi).” Disertasi Doktor, Universitas Lampung, 2023.

Flora, H. S. (2018). Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142-158.

Latif, N. R. “Tinjauan Yuridis terhadap Penyebarluasan Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam.”

Maulida, G., dan M. Romdoni. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual yang Mengalami Viktimisasi Sekunder di Media Sosial.” *Southeast Asian Journal of Victimology* 2, no. 1 (2024): 59–79.

Malau, P. “Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 837–844.

- Munib, M. A. (2018). Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Justitiabale-Jurnal Hukum*, 1(1), 60-73.
- Munte, H., dan C. S. T. Sagala. “Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 183–192.
- Murdiana, E., dan A. N. M. Rayhan. “Reformasi Hukum Pidana Kekerasan Seksual dari KUHP ke Keadilan Korban.” *Jurnal Supremasi* 15, no. 2 (2025): 63–82.
- Nesi, H., dan R. Umar. “Analisis Unsur ‘Tanpa Hak’ dalam Delik Kesusilaan UU ITE dalam Kasus Revenge Porn.” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2, no. 3 (2025): 51–58.
- Nur, F., dan L. Sirjon. “Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 7588–7603.
- Nurdianty, D. F. “Implementation of the Right to Be Forgotten as Legal Protection for Victims of *Non-Consensual Intimate Images (NCII)* in Gender-Based Cyber Violence (GBCV).” *Law Research Review Quarterly* 10, no. 2 (2024).
- Puannandini, D. A., D. Anggraeni, D. O. F. Gulo, A. A. Nur, dan J. K. Karabi. “Peran Ganda Media Sosial dalam Kasus Kekerasan Seksual Anak: Antara

Advokasi Publik dan Risiko Reviktimisasi Korban.” *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 2 (2025): 387–398.

Putra, D. N. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat dengan Restitusi (Studi Putusan Nomor 298/Pid.B/2024/PN Jmb)*. Disertasi Doktor, Universitas Batanghari Jambi, 2025.

Rahma, I. H. N., R. Apriyani, dan N. Aripkah. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kasus *Non-Consensual Intimate Images (NCII)* dalam Kekerasan Berbasis Gender Online di Kota Samarinda.” *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* 12, no. 1 (2025): 35–42.

Rahmi, A. “Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi sebagai Bentuk Perlindungan bagi Korban Kejahatan Seksual dalam Sistem Hukum di Indonesia.” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2019): 140–159.

Ramadani, W. “Dampak Media Sosial terhadap Struktur Sosial: Tinjauan Sosiologi Komunikasi.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2025): 724–730.

Ramasari, R. D., dan M. S. Ramadhan. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Konten yang Bermuatan Tindak Pidana Asusila melalui Media Facebook.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 9673–9685.

Romadhoni, K., U. Rosidin, M. A. Kholik, dan A. Alifi. “Urgensi Pembaharuan Hukum Melalui Pendekatan Ius Constitutum dan Ius Constituendum pada Tindak Pidana dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia.”

Salsadila, P. *Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Balas Dendam melalui Media Sosial*. 2023.

Sari, C. C. F., Salsabila, I. G., Akhmaddhian, S., & Anugrah, D. (2025). Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Merehabilitasi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Media Online. *Risalah Hukum*, 21(2), 164-172.

Sarman, A. A. L. *Analisis Perlindungan Hukum atas Kerahasiaan Identitas Anak dalam Penulisan Putusan di Situs Pengadilan = Analysis of Legal Protection for the Confidentiality of Children's Identity in Writing Decisions on Court Websites*. Disertasi Doktor, Universitas Hasanuddin, 2023.

Siagian, Z. A. P., dan T. Dompok. “Peranan Penting Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Tata Negara.” *Jurnal Riset Penelitian Universal* 6, no. 1 (2025).

Sholihin, A., dan H. Kurnia. “Internet Sebagai Media Penyebaran Ideologi Radikal: Dampak, Tantangan, dan Upaya Penanggulangannya.” *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal* 3, no. 1 (2023): 24.

Siringoringo, N. V. “Pengaruh Dark Tetrad terhadap Kecenderungan Perilaku Non-Consensual Dissemination of Intimate Image (*NCII*) pada Fase Emerging Adulthood.” 2024.

Suryantoro, D. D. “Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Korban Pemerkosaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 298–309.

Yanto, A., dan F. Hikmah. “Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menurut Perspektif Asas Legalitas.” *Recht Studiosum Law Review* 2, no. 2 (2023): 81–91.

Zaini, Z. D. “Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum.” *Pranata Hukum* 6, no. 2 (2011).

Zulkifli, A. N. “Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.” Disertasi Doktor, Universitas Hasanuddin, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. 2023. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. 2024. 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Republik Indonesia. 2025. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.